

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Andi Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Intenasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azhari, 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada Jember. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaa*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil. 1994. *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Evi Hartani. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- J.M. van Bemmelen. 1981. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bina Cipta. Bandung.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Penyelidikan & penyidikan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lili Rasyidi. 2001. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- M.Husein Harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 2011. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Abdoel Djamali. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghaliem Indonesia. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang PressIndo. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Sudarto. 2002. *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

B. Jurnal

Rudy Cahya Kurniawan, *Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol. 12 No. 3, Desember 2018.

Satriya Nugraha, *Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019.

Wawan Sanjaya, *Sinkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1 No. 15, Januari 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United nations Convension Againts Corruption*, 2003.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2018/12/10/jumlah-perkara-korupsi-di-sumbar>

